LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR NBP 10 TAHUN 2024



JLN. MELANTHON SIREGAR NO 49 KECAMATAN DOLOKSANGGUL- KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN- PROVINSI SUMATERA UTARA TELEPON: 06333211400



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT SEPULUH
Alamat	JLN. MELANTHON SIREGAR NO 49 KECAMATAN DOLOKSANGGUL- KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN- PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor Telepon	06333211400

Penjelasan Umum:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR NBP 10 pada tahun 2024 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9 TAHUN 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR NBP 10 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2024 yang mencakup:

🛚 Governance Process atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan 🖺

Governance Outcome atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda self assessment yang dilengkapi dengan laporan- laporan dan bukti- bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR NBP 10 terhadap Ketentuan Perundangundangan yang berlaku, dan nilai- nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Nama

Tambun Lumbantoruan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
- undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- c. Menindaklanjuti temuan audit interen dan auditor ekstern dari OJK dan Kantor Akuntan Publik.
- d. Melakukan tugas operasional penyaluran dan penghimpunan dana.
- e. Melakukan tugas operasional dibidang pengembangan & SDM

2. Nama

Jakub Damanik

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan TanggungJawab:

- a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Melakukan tugas dibidang operasional back office, penagihan, manajemen risiko dan APU-PPT

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Melakukan Evaluasi dan Kontroling terhadap Penerapan Manajemen Resiko sesuai dengan SOP yang berlaku.

- b. Melakukan penyelesaian terhadap kredit bermasalah
- c. Efisiensi biaya untuk pos-pos yang masih bisa di optimalkan
- d. Direksi telah melakukan penagihan kredit2 yang write off dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan insentif write off
- e. Meningkatkan kemampuan AO Lending dalam melakukan Analisa Kredit
- f. Follow Up terhadap temuan Audit Intern dan Pengawasan OJK.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama

Sugianto, ST

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan



Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

d. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Nama

Thomas Maduwu

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Menyarankan kepada Direksi membuat langkah konkrit untuk pencapaian Target setiap bulannya.
- b. Melakukan Evaluasi dan Kontroling terhadap Penerapan Manajemen Resiko sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Fokus menangani/ penyelesaian terhadap kredit bermasalah dan melakukan pemetaan kredit PAR dan menelusuri penyebab atau

permasalan debitur yang masuk dalam kategori PAR

d. Menyarankan Direksi agar mempersiapkan diri melakukan analisa terhadap kesiapan SDM dan Market untuk wilayah yang akan dibuat

kantor kas/cabang

- e. Efisiensi biaya untuk pos-pos yang masih bisa di optimalkan
- f. Meningkatkan Promosi dan Pencairan Kredit tetap memperhatikan Prinsip Kehati-hatian.
- g. Melakuakn Penerapan APU PPT lebih optimal di setiap lini bagian dan melakukan Update terkait data-data DTTOT.
- h. Follow Up terhadap temuan Audit Intern dan Pengawasan OJK.

NIHIL

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

PT BPR NBP 10 tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Reminerasi dan Nominasi

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

NIHIL



6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Tambun Lumbantoruan
	Persentase Kepemilikan (%)	1,93
2.	Nama	Jakub Damanik
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Kep	emilikan Saham Anggota Dewan Komisa	aris pada BPR
1.	Nama	Sugianto, ST
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Thomas Maduwu
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

anggota direksi yang memiliki shaam di PT BPR NBP 10 atas nama Tambun Lumbantoruan , dan untuk dewan komisaris tidak memiliki saham di PT BPR NBP 10

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Tambun Lumbantoruan
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,47
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,47

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Sugianto, ST
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	1,12
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,12



Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS Nama PT.NBP PT BPR NBP 1 Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) 65,73 Persentase Kepemilikan (%) Tahun 65,60 Sebelumnya PT. NBP Nama Nama Kelompok Usaha BPR PT BPR NBP 2 Persentase Kepemilikan (%) 50,00 Persentase Kepemilikan (%) Tahun 50,00 Sebelumnya PT. NBP Nama PT BPR NBP 3 Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) 90,57 Persentase Kepemilikan (%) Tahun 90,57 Sebelumnya PT. NBP Nama PT BPR NBP 4 Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) 71,32 Persentase Kepemilikan (%) Tahun 71,32 Sebelumnya Nama PT NBP PT BPR NBP 6 Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) 67,99 67,99 Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama PT.NBP

Nama Kelompok Usaha BPR

Persentase Kepemilikan (%)

PT BPR NBP 7

97,00



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	97,00
7.	Nama	PT.NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 8
	Persentase Kepemilikan (%)	74,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,97
8.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	88,53
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	88,53
9.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 10
	Persentase Kepemilikan (%)	93,81
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	93,81
10.	Nama	PT NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 11
	Persentase Kepemilikan (%)	81,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	81,08
11.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 12
	Persentase Kepemilikan (%)	56,94
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	56,94
12.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 15



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	77,52
13.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 16
	Persentase Kepemilikan (%)	74,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,00
14.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 17
	Persentase Kepemilikan (%)	75,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	75,75
15.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18
	Persentase Kepemilikan (%)	89,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	89,84
4.0	Nama	PT. NBP
16.	Ivallia	
16.	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 19
T16.		
16.	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 19
16.	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun	PT BPR NBP 19 72,61
	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	PT BPR NBP 19 72,61 72,61
	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama	PT BPR NBP 19 72,61 72,61 PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama Nama Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 19 72,61 72,61 PT. NBP PT BPR NBP 20
	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama Nama Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%)	PT BPR NBP 19 72,61 72,61 PT. NBP PT BPR NBP 20 76,75
17.	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	PT BPR NBP 19 72,61 72,61 PT. NBP PT BPR NBP 20 76,75 76,75
17.	Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya Nama Nama Kelompok Usaha BPR Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Persentase Kepemilikan (%) Nama	PT BPR NBP 19 72,61 72,61 PT. NBP PT BPR NBP 20 76,75 76,75 PT. NBP



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	82,84
19.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 24
	Persentase Kepemilikan (%)	72,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,97
20.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 25
	Persentase Kepemilikan (%)	92,45
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,45
21.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	76,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,21
22.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 28
	Persentase Kepemilikan (%)	76,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,38
23.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 29
	Persentase Kepemilikan (%)	74,73
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,73
24.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 31
	Persentase Kepemilikan (%)	72,68



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,68
25.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 32
	Persentase Kepemilikan (%)	58,31
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	58,31
26.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 33
	Persentase Kepemilikan (%)	78,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	78,58
27.	Nama	PT. NBP
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 34
	Persentase Kepemilikan (%)	92,15
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,15
28.	Nama	CONSTANTYN SOGUNTARON HUTASOIT
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 6
	Persentase Kepemilikan (%)	29,29
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	29,29
29.	Nama	CONSTANTYN SOGUNTARON HUTASOIT
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR NBP 4
	Persentase Kepemilikan (%)	12,44
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,03
30.	Nama	TAMBUN LUMBANTORUAN
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,47



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,47
31.	Nama	CONSTANTYN SOGUNTARON HUTASOIT
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 14
	Persentase Kepemilikan (%)	25,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,21
32.	Nama	CONSTANTYN SOGUNTARON HUTASOIT
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 31
	Persentase Kepemilikan (%)	8,54
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,54

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain		
Ì	1.	Nama	TAMBUN LUMBANTORUAN
		Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR NBP 22
		Persentase Kepemilikan (%)	0,47

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	SUGIANTO, ST
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	1,12

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1	۱.	Nama	Tambun Lumbantoruan
		Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
		Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada



	Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Jakub Damanik
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Sugianto, ST
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Thomas Maduwu
2.	Nama Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Thomas Maduwu Tidak ada
2.	Hubungan Keuangan Dengan	

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Direksi PT BPR NBP 10 tidak memiliki hubungan keuangan di PT BPR NBP 10 Dewan Komisaris PT BPR NBP 10 tidak memiliki hubungan keuangan di BPR



10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR				
1.	Nama	Tambun Lumbantoruan		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada		
2.	Nama	Jakub Damanik		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada		
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR				
1.	Nama	Sugianto, ST		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada		
2.	Nama	Thomas Maduwu		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada		
	Hubungan Keluarga Dengan	Tidak ada		

Pemegang Saham Lain di BPR



Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Direksi PT BPR NBP 10 tidak memiliki hubungan keluarga di BPR. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga di BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun		
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp728.400.000	
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp390.000.000	

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun		
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp181.160.951	
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp109.599.125	

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun		
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0	
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang	
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0	



(Rp)

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi	Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi d	an Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp43.348.700
2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewa	an Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp31.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris	Rp0



2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun			
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang		
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0		
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang		
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp69.600.000		
2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi d	dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun		
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang		
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp74.601.600		
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang		
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp28.684.000		
2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi	dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun		
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang		
Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya Direksi (Rp)	Rp0		
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang		

Rp0

NIHIL

Komisaris (Rp)

Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya



12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

	D : / \			1 /1 \ ''		
- 1	Rasio (a)	dali bedawai	Vang tertinggi	idan (h) dali	pegawai yang	terendah
	. i tabib (a)	gali pogawai	yang toranggi	adii (b) gaji	pogawai yang	tororidari

Rasio (a/b) 2,50 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,01 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,18:1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,47 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,89 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Tanggal Rapat
 Jumlah Peserta
 23 Februari 2023
 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2023
- 2. Rencana Kerja tahun 2024
- 3. Rencana Kick Off BPR
- 4. Persiapan RUPST dan RUPSLB
- 5. APU dan PPT
- 6. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

2. Tanggal Rapat27 Maret 2024Jumlah Peserta2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- 1. Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2024
- 2. Rencana Kerja Maret 2024
- 3. APU dan PPT



1	Temuan	Andit	Intornal
4.	i emiian	Allalt	ınternai

5. Pelaksanaan CKPN

3. Tanggal Rapat 13 Juni 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- 1. Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2024
- 2. Rencana Kerja Juni 2024
- 3. APU dan PPT
- 4. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal
- 5. Tindak lanjut CKPN sesuai rencana tindak ke OJK
- 6. Lain lain

4.	Tanggal Rapat	27 September 2024
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- 1. Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2024
- 2. Rencana Kerja September 2024
- 3. APU dan PPT
- 4. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal
- 5. Tindak lanjut CKPN sesuai rencana tindak ke OJK

5.	Tanggal Rapat	30 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- 1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2024
- 2. Rencana Kerja Oktober 2024
- 3. POJK No 22 Tahun 2023 tentang perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- 4. APU dan PPT
- 5. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal
- 6. Peningkatan kantor kas menjadi kantor cabang
- 7. Tindak lanjut Komitmen temuan OJK tahun 2024
- 8. Pengawasan atas pelaksanaan penerapan Manajemen risiko.

Dewan komisaris melaksanakan rapat sebanyaki 5 kali dalam tahun 2024

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sugianto, ST
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir



		Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2	2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Thomas Maduwu
		Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
		Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal ole	eh Pegawai Tetap
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.4. Jumlah Penyimpangan Internal ole	eh Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun

Sebelumnya



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan atau internal fraud

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi PT. BPR NBP 10

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
1.	Tanggal Pelaksanaan	08 November 2024			
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan So	sial		
	Penerima Dana	GEREJA HKBP	KOTA		
	Penjelasan Kegiatan	PEMBERIAN	DANA	SOSIAL	UNTUK



		PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MINGGU GEREJA HKBP KOTA
	Jumlah (Rp)	Rp1.250.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	18 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	GEREJA HKBP RANTAU PARAPAT
	Penjelasan Kegiatan	PEMBERIAN DANA UNTUK OIKUMENE HKBP RANTAU PARAPAT
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	GEREJA GKPS
	Penjelasan Kegiatan	SUMBANGAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN GEREJA GKPS
	Jumlah (Rp)	Rp200.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR NBP 10 untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Doloksanggul, 30 April 2025

PT. BPR NBP 10

bank nbp pt bpr nbp 10

Tambun Lumbantoruan Direktur Utama

Laporan Transparansi Tata Kelola PT. BPR NBP 10 Tahun 2024 · Halaman 21

Komisaris